

**TINGKAT PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT
DALAM PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2009
DI KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan
sebagai salah satu persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan*



Oleh :

**DEVI AZMI
TM/NIM : 2006/79268**

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul :Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Anggota
Legislatif Tahun 2009 di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang

Nama : Devi Azmi
TM/NIM : 2006 / 79268
Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 17 Januari 2011

Disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Muhardi Hasan, M.Pd
NIP. 19511005 198010 1 001

Dra. Al Rafni, M.Si
NIP. 19680212 199303 2 001

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada Hari Senin Tanggal 17 Januari 2011 Pukul 10 s/d 11.30 WIB

Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2009 Di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang

Nama : Devi Azmi
TM/NIM : 2006 / 79268
Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 17 Januari 2011

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. H. Muhardi Hasan, M.Pd	_____
Sekretaris	: Dra. Al Rafni, M.Si	_____
Anggota	: Drs. M. Fachri Adnan, M.Si. Ph.D	_____
Anggota	: Drs. H.Helmi Hasan, M.Pd	_____
Anggota	: Drs. Suryanef, M.Si	_____

Mengesahkan :
Dekan FIS UNP

Prof. Dr.Azwar Ananda, MA
NIP. 19610720 198602 1 001

ABSTRAK

Devi Azmi : TM/NIM : 2006/79268, Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2009 Di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang

Penelitian ini dilatarbelakangi karena partisipasi politik masyarakat pada pemilu legislatif satu ke pemilu legislatif selanjutnya cenderung mengalami penurunan padahal penyelenggaraan peraturan pemilu sudah menuju ke arah yang lebih demokratis. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui tentang tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan anggota legislatif tahun 2009 di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Tujuan penelitian untuk memperoleh gambaran tentang tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan anggota legislatif tahun 2009 di Kecamatan Koto Tangah yang dilihat pada tahap kampanye dan tahap pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan anggota legislatif tahun 2009 di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, dengan jumlah populasi 105.224 orang diambil sampel dalam penelitian ini sebanyak 96 orang dengan menggunakan rumus *Frank Lynch*. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran angket. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yang terdiri atas dua sub variabel yaitu : (1) Tingkat partisipasi politik masyarakat pada tahap kampanye, (2) Tingkat partisipasi politik masyarakat pada tahap pemungutan dan penghitungan suara. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dengan perhitungan persentase (%) yaitu teknik analisis statistik deskriptif.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa : (1) Tingkat partisipasi politik masyarakat pada tahap kampanye dalam pemilihan anggota legislatif tahun 2009 di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang termasuk kategori sedang dengan persentase 63,28% (2) Tingkat partisipasi politik masyarakat pada tahap pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan anggota legislatif tahun 2009 di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang termasuk kategori sedang dengan persentase 69,18%. Dari temuan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan anggota legislatif tahun 2009 di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang berada pada kategori sedang. Partisipasi politik masyarakat berada pada kategori sedang karena kurangnya keikutsertaan masyarakat terhadap kegiatan pemilu. Hal itu disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan haknya sebagai pemilih serta disebabkan karena faktor pendidikannya masih pada tingkat menengah serta tingkat pekerjaan yang pada umumnya sebagai pedagang/wiraswasta sehingga masyarakat lebih mengutamakan mencari penghasilan demi kehidupannya dan masyarakat beranggapan bahwa kegiatan pemilu merupakan kegiatan yang membuang waktu dan tidak memberi perubahan dalam kehidupannya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2009 Di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada arwah Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Sarjana Strata satu (S1) Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Azwar Ananda, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial.
3. Bapak Drs. H. Muhardi Hasan, M.Pd, selaku pembimbing I yang selalu sabar dan setulus hati memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dra. Al Rafni, M.Si, selaku pembimbing II yang selalu sabar dan setulus hati telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si. Ph.D, selaku penguji yang telah banyak memberikan saran dan kritikan dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Helmi Hasan, M.Pd, selaku penguji yang telah banyak memberikan saran dan kritikan dalam penyempurnaan skripsi ini.

7. Bapak Drs. Suryanef, M.Si, selaku penguji yang telah banyak memberikan saran dan kritikan dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si, selaku Penasehat Akademis yang selalu memberikan dukungan dan izin dalam penyusunan skripsi ini
9. Orang tua dan keluarga yang tidak henti-hentinya telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis secara moral maupun material serta doa untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini
10. Teman-teman seperjuangan terutama bagi rekan-rekan PKN 2006 yang telah memberikan masukan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua bimbingan, dukungan, bantuan, masukan dan kritikan serta motivasi dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis semoga dibalas oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran semua pihak agar tercapainya kesempurnaan dari skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan semua pihak.

Padang, 17 Januari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah	10
1. Identifikasi Masalah	10
2. Pembatasan Masalah	11
3. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Teoritis	14
1. Partisipasi Politik Masyarakat	14
a. Fungsi Partisipasi Politik.....	16
b. Sifat Partisipasi Politik	17
c. Bentuk Partisipasi Politik	19
2. Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2009	23
a. Hakikat Pemilu Legislatif	23
b. Asas dalam Pemilu Legislatif	24
c. Tahapan Pelaksanaan Pemilu legislatif tahun 2009.....	25
B. Kerangka Konseptual	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	34
B. Variabel Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian	40
D. Populasi dan Sampel	40
1. Populasi	40
2. Sampel	42
E. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpul Data	44
1. Jenis Data	44
2. Sumber Data	44
3. Teknik dan Alat Pengumpul Data	45
F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian	45
G. Teknik analisis data	52

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum ..	56
1. Deskriptif Wilayah Penelitian	56
2. Karakteristik Responden	59
B. Temuan Khusus	62
1. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pada Tahap Kampanye..	62
2. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pada Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara	68
C. Pembahasan	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ..	82
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

NO		HALAMAN
1.1	Tabel hasil pemilihan anggota legislatif tahun 2009 di Kota Padang	5
1.2	Tabel hasil pemilihan walikota dan wakilnya tahun 2008 di Kota Padang	6
1.3	Tabel hasil pemilihan anggota legislatif tahun 2009 tiap kecamatan Kota Padang	8
3.1	Tabel jumlah masyarakat terdaftar dalam DPT di Kecamatan Koto Tangah	41
3.2	Tabel jumlah sampel menurut kelurahan	43
3.3	Tabel jawaban pertanyaan/ Pernyataan	45
3.4	Tabel kisi-kisi instrumen penelitian	46
3.5	Tabel hasil uji validitas butir instrumen	51
3.6	Tabel tingkat reliabilitas	50
3.7	Tabel hasil uji reliabilitas	52
4.1	Tabel jumlah penduduk kecamatan koto tangah berdasarkan jenis kelamin	58
4.2	Tabel data masyarakat menurut tingkat pendidikan	59
4.3	Tabel data responden menurut jenis kelamin	59
4.4	Tabel data responden menurut jenis pekerjaan	60
4.5	Tabel data responden menurut usia	61
4.6	Tabel distribusi tingkat partisipasi politik masyarakat pada tahap kampanye	63
4.7	Tabel hasil penelitian tingkat partisipasi politik masyarakat pada tahap kampanye	66
4.8	Tabel distribusi tingkat partisipasi politik masyarakat pada tahap pemungutan dan penghitungan suara	68
4.9	Tabel hasil penelitian tingkat partisipasi politik masyarakat pada tahap pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu legislatif tahun 2009	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Angket Penelitian
Lampiran 2	Data uji coba angket
Lampiran 3	Output SPSS uji validitas reliabilitas
Lampiran 4	Tabulasi angket penelitian
Lampiran 5	Tabulasi angket penelitian per sub variabel
Lampiran 6	Tabel frekuensi jawaban responden terhadap angket penelitian
Lampiran 7	Deskriptif data
Lampiran 8	Distribusi persentase angket penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia melakukan tahapan baru dalam pemilu yang demokratis yakni dimulai pada tahun 2004 karena pemilu yang diselenggarakan pada tahun itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya (Sarwono Sw 2008 : 13). Hal ini didasarkan pada pemilihan anggota legislatif dan eksekutif dipilih langsung oleh masyarakat. Dengan demikian rakyat mempunyai kedaulatan penuh untuk menentukan arah perjalanan bangsa ke depan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Sarwono Sw (2008 : 14) menyatakan bahwa "Demokrasi yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas".

Begitu pentingnya partisipasi masyarakat di dalam kehidupan berdemokrasi yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembangunan politik bangsa Indonesia. Partisipasi masyarakat tersebut dibutuhkan agar dapat mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo (1994: 183) yaitu

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).

Sedangkan bentuk partisipasi politik masyarakat menurut Gabriel Almond dalam Suryanef dan Al Rafni (1998 : 13) salah satunya adalah pemberian suara (voting), pelaksanaan voting dapat dilihat dalam pemilu terutama pada pemilihan anggota legislatif.

Pemberian suara (voting) yang dilakukan di negara kita telah terjadi pada pemilu legislatif sebelumnya dimana pemberian suara tersebut dapat dilihat pada Pemilu pertama yakni dilakukan pada tahun 1955, Pada tahun ini pelaksanaan pemilu berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis itu terbukti dari tingkat partisipasi politik masyarakat dimana jumlah pemilih yang memberikan suaranya dapat dikatakan tinggi yaitu 87,65% pemilih mempergunakan hak pilihnya untuk memilih sedangkan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya hanya 12,35% (Ahmad budiman : 2009)

Pada masa orde baru Negara kita telah berhasil menyelenggarakan enam kali pemilihan umum, tepatnya pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. pada pemilu pertama tahun 1971 ternyata 94,3% pemilih yang menggunakan haknya jadi hanya 5,7% pemilih yang tidak memberikan suaranya. Sementara pada tahun 1977 terjadi penurunan pemberian suara masyarakat dimana jumlah pemilih yang tidak memberikan suaranya 9,43%. Namun, tingkat partisipasi politik masyarakat masih dikatakan cukup tinggi karena 90,57% masyarakat yang menggunakan hak pilihnya (Arbi Sanit, 1985 : 186-192)

Pada pemilu ketiga yakni tahun 1982, jumlah penduduk yang memberikan suaranya 91,16% yaitu meningkat sebesar 0,59% tetapi tetap lebih rendah dari pemilu tahun 1971. Sedangkan pada pemilu tahun 1987, jumlah penduduk yang memberikan suaranya sebesar 94% dari yang berhak pilih. Sementara dalam pemilu tahun 1992, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih adalah sebesar 95% (Miriam Budiardjo, 1996 : 44). Semua itu disebabkan karena banyaknya kecurangan atau penyelewengan dalam partisipasi politik masyarakat dalam penggunaan hak pilih, hal itu sejalan dengan pendapat Ismanto dalam Hafied Cangara (2009 : 241), menjelaskan penyelewengan yang terjadi pada rezim ini yakni rakyat dimobilisasi dan diintimidasi untuk mencoblos partai tertentu terkhususnya rakyat berkewajiban dan bertanggung jawab memenangkan partai Golongan Karya (Golkar) serta sangat dibatasinya seseorang atau sekelompok orang untuk membentuk partai politik.

Dari penyelewengan atau kecurangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilu pada rezim orde baru tersebut masyarakat mengalami berbagai tekanan dan pembatasan dalam menggunakan hak pilih dengan mengabaikan aspirasi rakyat (masyarakat) serta tidak membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya yang akhirnya tidak membawa perubahan apa-apa dalam pemilu legislatif.

Pasca reformasi, terjadi perubahan format pemilu kearah yang demokratis dengan tujuan agar tidak ada lagi penyelewengan seperti yang terjadi pada masa orde baru. Dari segi electoral law sudah terdapat perubahan, itu terbukti dengan dikeluarkannya UU No 12 tahun 2003, pertimbangan inti dikeluarkannya UU tersebut agar penyelenggaraan Pemilu dalam memilih anggota legislatif dan eksekutif dipilih langsung oleh rakyat sehingga dibutuhkan aspirasi dan partisipasi rakyat seluas-luasnya serta membuka kesempatan kepada setiap orang atau golongan orang untuk membentuk partai politik dengan pelaksanaan pemilu yang berdasarkan Undang-Undang.

Namun dari evaluasi pemilu pasca reformasi tingkat partisipasi politik masyarakat mengalami penurunan daripada pemilu sebelumnya yaitu 84% pemilih yang menggunakan hak pilihnya sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 16%, dengan tingginya keberhasilan golongan putih (Golput) (Hafied Cangara, 2009 : 248). Rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu mengakibatkan kerugian dari berbagai pihak yaitu suatu pembangunan politik ke arah yang demokratis menjadi kurang tercapai, pemerintah yang fungsinya sebagai perwakilan rakyat hanya sebatas simbol dan yang terpenting adalah bagi masyarakat itu sendiri dapat diartikan bahwa masyarakat sudah melepaskan diri hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pemilu bahkan tidak peduli terhadap hal-hal politik dalam kenegaraan (Arbi Sanit, 1985 : 190- 193)

Kemudian pada pemilihan anggota legislatif tahun 2009 di Kota Padang telah diselenggarakan pada tanggal 9 April 2009 yang merupakan pemilu legislatif kesepuluh di Indonesia. Pemilu pada tahun ini juga tidak akan berhasil jika tidak mendapat dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat, oleh karena itu sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat yang tinggi karena satu suara pada pemilu sangat menentukan perjalanan arah pemerintahan kedepannya. Namun kenyataannya juga masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya di Kota Padang ini, hal itu dapat dilihat dari catatan Rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan anggota legislatif tahun 2009 di Kota Padang, yaitu :

Tabel 1.1
Rekapitulasi hasil perolehan suara pada pemilihan anggota legislatif tahun 2009 di Kota Padang

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Menggunakan hak pilih	348.226	63,54%
2.	Tidak menggunakan hak pilih	199.788	36,46%
3.	Pemilih terdaftar	548.014	100

Sumber : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Tahun 2008 .

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya yaitu 63,54% telah mengalami peningkatan sebesar 6,11% jika dibandingkan dengan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2008 yang menggunakan hak pilihnya hanya mencapai 57,43%. Namun dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemberian suara di pemilihan

anggota legislatif ini masih jauh mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya.

Kemudian pada tahun 2008, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah berlangsung pada tanggal 23 Oktober tahun 2008 di Kota Padang. Pemilihan tersebut merupakan Pilkada pertama yang memilih walikota beserta wakilnya secara langsung sehingga masyarakat bisa terlibat langsung dalam pemilihan dimana seharusnya pemilihan ini dapat dikatakan lebih demokratis. Namun kenyataannya, partisipasi politik masyarakat yang memilih dalam Pilkada di Kota Padang tahun 2008 jauh mengalami penurunan. Hal ini dibuktikan dari catatan Rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Padang, yaitu :

Tabel 1.2
Rekapitulasi hasil perolehan suara pada pemilihan walikota beserta wakilnya periode 2008-2013 di Kota Padang

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Menggunakan hak pilih	309.486	57,43
2.	Tidak menggunakan hak pilih	231.987	42,57
3.	Pemilih terdaftar	541.473	100

Sumber : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Tahun 2008.

Data di atas menunjukkan bahwa masih banyak pemilih yang tidak berpartisipasi dalam pemberian suara pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Padang yaitu sebesar 42,57%. Dan ternyata hasil suara yang tidak menggunakan hak pilihnya jauh lebih besar dibandingkan pasangan pemenang yaitu 156.339.

Jadi pada pilkada tahun 2008 pencapaian angka tertinggi diraih oleh Golput. Dimana Kecamatan Koto Tangah mencapai Golput yang lumayan tinggi. Padahal partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum secara langsung merupakan salah satu bentuk perwujudan pemerintahan yang demokratis.

Dari hasil pemilu tersebut penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat pada tahap kampanye dan pada tahap pemungutan dan penghitungan suara karena pada tahap inilah banyak dibutuhkan keterlibatan masyarakat sedangkan pada tahap pendaftaran Panitia pemungutan suara yang aktif mendata nama-nama pemilih tersebut sedangkan masyarakat hanya bersifat pasif. Menurut Ahmad Budiman (2009), Banyaknya terjadi kecurangan dan penyelewengan pada saat penyelenggaraan pemilu, yaitu kerancuan data pemilih diakibatkan karena pendataan yang kurang maksimal terutama kekurangan yang diakibatkan kelemahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara dimana banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Menurut Irvan Mawardi (2008), penyelenggaraan pemilu menyebabkan kerawanan terjadinya konflik terutama pada saat pemungutan suara dan pada saat penghitungan suara. Konflik tersebut dapat berupa persaingan antar masyarakat dalam mendukung partainya yang diwujudkan dalam tindakan anarkis atau kekerasan, kemudian penempatan gambar caleg yang menyalahi aturan, bahkan

pada kegiatan-kegiatan kampanye banyak masyarakat yang dimobilisasi untuk ikut serta dan aktif untuk berkampanye untuk memilih salah satu calon anggota legislatif dengan iming-iming tertentu. Seperti diberi janji-janji manis dengan alasan mensejahterakan kehidupan masyarakat, pemberian uang, sembako serta adanya money politics dalam masa berkampanye.

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketahui jumlah pemilih yang terdaftar, menggunakan hak pilih dan yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan kecamatan yang berada di Kota Padang yaitu :

Tabel 1.3
Rekapitulasi hasil pemilihan anggota legislatif tahun 2009 di Kota Padang

No.	Kecamatan	Terdaftar	Menggunakan hak pilih	Tidak menggunakan hak pilih	% Pemilih yang menggunakan hak pilih
1.	Padang Barat	36.590	21.196	15.394	57,93%
2.	Padang Utara	43.903	24.505	19.398	55,82%
3.	Koto tengah	105.224	66.093	39.131	62,81%
4.	Nanggalo	36.973	23.128	13.845	62,55%
5.	Kuranji	80.412	51.698	28.714	64,29%
6.	Pauh	35.517	22.424	13.093	63,14%
7.	Padang Timur	54.864	34.049	20.815	62,06%
8.	Padang Selatan	40.794	26.503	14.291	64,96%
9.	Bungus Teluk Kabung	14.789	10.768	4.021	72,81%
10.	Lubuk Kilangan	31.174	20.306	10.868	65,13%
11.	Lubuk Begalung	67.774	47.556	20.218	70,16%
Jumlah		548.014	348.226	199.788	-

Sumber : komisi pemilihan umum (KPU) Kota Padang tahun 2009

Dari data di atas dapat dilihat bahwa tiap kecamatan dapat dikatakan persentase yang cukup tinggi dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya salah satunya adalah Kecamatan Koto Tangah. Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebesar 62,81%, namun seharusnya persentase yang dicapai Koto Tangah harus lebih tinggi daripada persentase diatas karena Kecamatan Koto tangah memiliki paling banyak jumlah pemilih yang terdaftar di DPT serta memiliki jumlah penduduk dan jumlah kelurahan paling banyak jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya namun kenyataannya pada Pilkada tahun 2008 Kecamatan Koto Tangahlah yang memiliki angka Golput tertinggi jika dibandingkan dengan 10 kecamatan lainnya (Data KPU Kota Padang tahun 2009).

Dari fenomena di atas, oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk mengetahui dan meneliti tentang ”Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2009 di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang ”.

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka identifikasi masalahnya adalah:

- a. Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan anggota legislatif sebelumnya
- b. Banyaknya masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan kampanye karena adanya iming-iming tertentu
- c. Masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya atau tidak memberikan suaranya dalam pemilihan anggota legislatif
- d. Banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilihan Tetap.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan mengingat pemilu legislatif tahun 2009 ini ada sepuluh tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan yakni : Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, Pendaftaran Peserta Pemilu, Penetapan Peserta Pemilu, Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, Masa kampanye, Masa tenang, Pemungutan dan penghitungan suara, Penetapan hasil Pemilu dan Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota (UU RI No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Mengingat keterbatasan dan kemampuan penulis maka penulis membatasi masalah hanya pada dua tahap penyelenggaraan pemilihan saja yaitu pada tahap kampanye dan pada tahap pemungutan dan penghitungan suara. Dimana pada tahap ini disamping banyaknya peran serta masyarakat namun pada kedua tahap inilah juga terjadinya suatu kerawanan konflik antar masyarakat kemudian banyaknya terjadi suatu pelanggaran dalam kegiatan kampanye. Oleh karena itu penulis hanya membahas tentang tingkat partisipasi politik masyarakat pada tahap kampanye dan tingkat partisipasi politik masyarakat pada tahap pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan anggota legislatif tahun 2009 di Kecamatan Koto Tangah di Kota Padang.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka permasalahan yang akan penulis teliti adalah :

1. Bagaimanakah tingkat partisipasi politik masyarakat pada tahap kampanye dalam pemilihan anggota legislatif tahun 2009 di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang?
2. Bagaimanakah tingkat partisipasi politik masyarakat pada tahap pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan anggota legislatif tahun 2009 di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini, adalah :

1. Untuk memperoleh gambaran tentang tingkat partisipasi politik masyarakat pada tahap kampanye dalam pemilihan anggota legislatif tahun 2009 di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang
2. Untuk memperoleh gambaran tentang tingkat partisipasi politik masyarakat pada tahap pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan anggota legislatif tahun 2009 di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk :

1. Kegunaan teoritis yaitu Menambah pengetahuan dan pemahaman terutama bagi peneliti dan pembaca tentang tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan anggota legislatif tahun 2009 di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang
2. Kegunaan praktis sebagai masukan bagi di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyelenggarakan pemilihan anggota legislatif yang demokratis
3. Peneliti lain untuk melakukan kajian yang lebih luas dan mendalam. tentang tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis

1. Partisipasi Politik Masyarakat

Konsep partisipasi politik merupakan gabungan dari dua buah kata yaitu partisipasi dan politik. Kata ini berasal dari bahasa latin, partisipasi berasal dari kata kerja "participare" yang berarti ikut serta. Sedangkan politik berasal dari kata benda "politia" yang berarti tata negara atau kehidupan bersama (Yuhdi : 2010). Dengan demikian dapat disimpulkan partisipasi politik mengandung arti sebagai "Ikut serta dalam proses tata negara atau kehidupan bersama".

Dari pengertian partisipasi dan politik tersebut, kemudian definisi partisipasi politik menurut para ahli, diantaranya adalah menurut Ramlan Surbakti (1992 : 118) menjelaskan bahwa "partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi kehidupannya". Hal ini berarti adanya keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Samuel P.Huntington dan Joan M.Nelson (1994 : 6), mengatakan bahwa "partisipasi politik adalah kegiatan

warga yang bertujuan untuk mempengaruhi perbuatan keputusan oleh pemerintah”. Sedangkan Miriam Budiarjo (1994 : 183) menjelaskan bahwa :

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yakni dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Lain halnya menurut Michael Rush dan Phillip Althoff (2005 : 23), mengatakan “partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik”. Sehingga dari pengertian tersebut dapat dilihat berbagai macam bentuk partisipasi politik di urutkan sesuai dengan frekuensi dan intensitas partisipasi tersebut.

Berdasarkan empat definisi partisipasi politik di atas, maka penulis menyimpulkan definisi partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara yang bertujuan mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah.

Menurut Irvan Mawardi (2008), mengatakan bahwa “Partisipasi politik masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara perseorangan (*privat citizen*) untuk mengerti, menyadari, mengkaji, dan memprotes suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan mempengaruhi kebijakan agar aspiratif terhadap kepentingan negara”.

Partisipasi politik dapat diwujudkan keikutsertaan rakyat dalam kegiatan politik, pengertian politik tidak berfokus hanya memperoleh dan mempertahankan kekuasaan saja, akan tetapi lebih luas berkaitan dengan kesejahteraan dan

kebaikan bersama dalam hidup berbangsa dan bernegara termasuk warga negara yang taat pada hukum positif.

a. Fungsi Partisipasi Politik

Menurut Robert Lane dalam Sudijono Sastroatmojo (1995:84-85) menyebutkan bahwa partisipasi politik memiliki empat fungsi, yakni;

1. Sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi, partisipasi politik seiring muncul dalam bentuk upaya-upaya menjadikan arena politik untuk memperlancar usaha ekonominya ataupun sebagai sarana untuk mencari keuntungan material.
2. sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial, yakni memenuhi kebutuhan akan harga diri, meningkatnya status sosial, dan merasa terhormat karena bergaul dengan pejabat-pejabat terkemuka dan penting. Pergaulan yang luas bersama pejabat-pejabat itu pula yang mendorong partisipasi orang-orang tersebut akan puas bahwa politik dapat memenuhi kebutuhan terhadap penyesuaian sosialnya.
3. Sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus dalam hal ini orang berpartisipasi dalam politik dan dianggap dapat dijadikan sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu seperti untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan proyek dan tender, melicinkan karier bagi jabatannya. Nilai-nilai khusus dan kepentingan individu tersebut apabila tercapai maka akan makin mendorong partisipasinya dalam politik.

4. Sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bahwa sadar dan kebutuhan psikologi tertentu, seperti kepuasan batin, perasaan terhormat, merasa menjadi sosok yang penting dan dihargai orang lain dan kepuasan-kepuasan atas target yang telah ditetapkan.

Menurut Firman Insan (2008), Partisipasi politik masyarakat bagi pemerintah berfungsi sebagai:

- a. Partisipasi politik masyarakat untuk mendukung program-program pemerintah.
- b. Partisipasi politik masyarakat berfungsi sebagai organisasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan.
- c. Partisipasi politik dapat digunakan sebagai sarana untuk memberikan masukan, saran, kritik terhadap pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.
- d. Partisipasi politik merupakan sebuah mekanisme pelaksanaan fungsi kontrol terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan.

b. Sifat Partisipasi Politik

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1994:9), menguraikan bahwa partisipasi politik berdasarkan dua sifat yaitu:

- a. Autonomous Participation (Partisipasi Otonom)
- b. Mobilized Participation (Partisipasi Dimobilisasi)

Menurut Arbi Sanit (1985 : 93) yang mengatakan “Partisipasi yang otonom adalah aktivitas masyarakat dalam berpolitik yang berdasarkan dari inisiatif sendiri, bersifat spontan dan dilakukan secara sukarela (tanpa adanya paksaan atau tekanan)”.

Kemudian Ramlan Surbakti (1992 : 142) menjelaskan bahwa : “Partisipasi yang dimobilisasi adalah partisipasi yang digerakkan oleh pihak lain atau dukungan yang diberikan karena terpaksa. Jadi partisipasi mobilisasi adalah partisipasi masyarakat karena adanya pihak yang berkepentingan untuk mencapai tujuannya, sementara itu masyarakat yang terlibat dalam kegiatan partisipasi tersebut justru tidak memahami dengan baik apa yang dilakukannya, bahkan partisipasi tersebut karena adanya imbalan materi atau digerakkan di bawah ancaman tertentu.

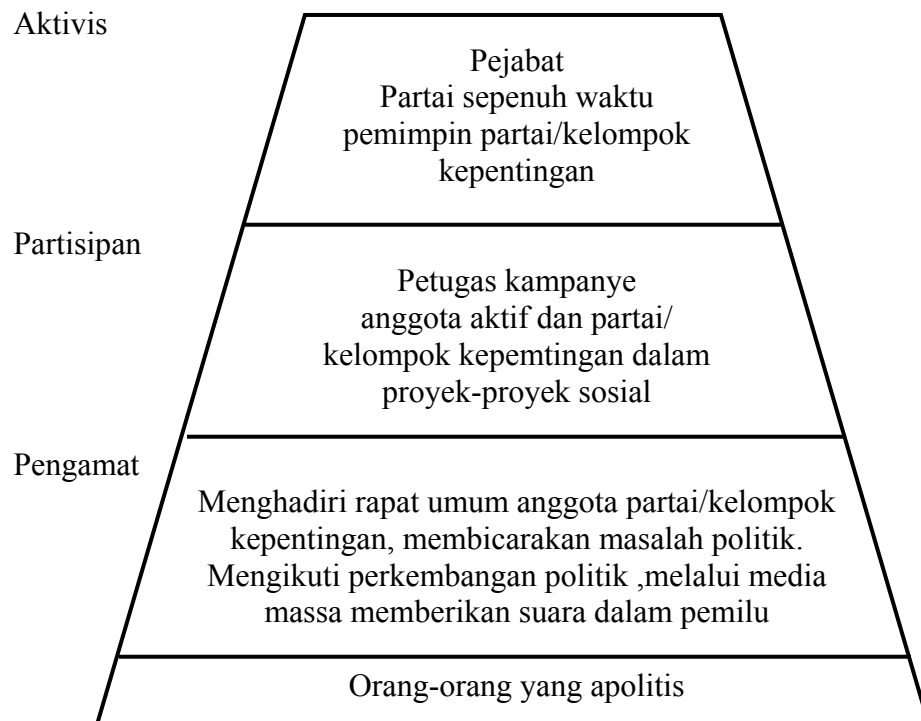
Jadi dapat disimpulkan bahwa sifat partisipasi politik itu terdiri atas partisipasi otonom dan partisipasi dimobilisasi. Partisipasi otonom dapat diartikan partisipasi berdasarkan inisiatif dan keinginan sendiri dari hati nurani seseorang. Sedangkan partisipasi dimobilisasi dapat digerakkan oleh orang lain untuk berpartisipasi baik dengan bujukan maupun dengan paksaan.

Dengan demikian sifat partisipasi politik tersebut ada yang berdasarkan atas kesadaran dari diri sendiri dan ada pula yang berdasarkan atas pengaruh, bujukan bahkan paksaan dari orang lain.

c. Bentuk Partisipasi politik

Partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Menurut bentuknya partisipasi politik lebih menunjukkan pada berbagai aktifitas nyata dari warga negara dalam suatu proses politik. Menurut Roth dan Wilson dalam Budiardjo (1994 : 190), menguraikan bentuk partisipasi politik warga Negara berdasarkan intensitasnya. Intensitas terendah adalah sebagai pengamat, intensitas menengah yaitu sebagai partisipan, dan intensitas partisipasi tertinggi sebagai aktivis. Bila dijenjangkan, intensitas kegiatan politik warga Negara tersebut membentuk segitiga.

Berbagai kegiatan politik dapat dilihat dari piramida partisipasi politik, yaitu :



Sumber : David F. Roth dan Frank L. Wilson. 1976. *The Comparative Study of politics*, Edisi II (Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice Hall, Inc. , 1980) hl. 151. (Miriam Budiardjo, 1994 : 189)

Kemudian Michael Rush dan Philip Althoff dalam Rafael Raga Maran (2001 : 148) mengidentifikasikan bentuk-bentuk partisipasi politik yang disebut hirarki partisipasi politik sebagai berikut :

- Menduduki jabatan politik atau administratif
- Mencari jabatan politik atau administratif
- Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi politik
- Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik
- Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi-politik
- Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi-politik
- Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi dan sebagainya
- Partisipasi dalam diskusi politik informal
- Partisipasi dalam pemungutan suara (voting)

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi politik berlaku di berbagai tipe kegiatan dalam sistem politik. Dan partisipasi politik dalam pemilu merupakan urutan terendah dari berbagai kegiatan politik lainnya.

Lain halnya dengan Ramlan Surbakti (1992 : 141-142), mengkategorikan partisipasi politik dalam bentuk kegiatan konvensional dan tak konvensional. Kegiatan konvensional ini dapat dilihat dari kegiatan seperti pemberian suara (voting), diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif. Sedangkan bentuk partisipasi yang tak konvensional seperti pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi, mogok dan tindak kekerasan politik lainnya.

Kemudian menurut Samuel P. Huntington dan Nelson (1994 : 16-18) membedakan bentuk kegiatan partisipasi politik, yakni:

- a. Kegiatan pemilihan umum merupakan alat untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah yakni mencakup pemberian suara, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.
- b. Lobbying yakni mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.
- c. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang bertujuan utamanya dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Menjadi anggota organisasi sudah merupakan bentuk partisipasi politik tidak peduli apakah orang yang bersangkutan ikut aktif atau tidak dalam upaya organisasi itu mempengaruhi pemerintah.
- d. Mencari koneksi (*contacting*) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu atau segelintir orang.

- e. Tindak kekerasan (*Violence*) merupakan bentuk partisipasi politik sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta

Kemudian menurut Gabriel Almond dalam Suryanef dan Al Rafni (1998 : 13-14) menguraikan bentuk partisipasi politik yang dibedakan atas dua bentuk yakni:

- 1) Bentuk partisipasi politik yang konvensional merupakan bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern, meliputi;
 - a. Pemberian Suara (voting)
 - b. Diskusi Politik
 - c. Kegiatan Kampanye
 - d. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan.
 - e. Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif.
- 2) Bentuk partisipasi politik yang non konvensional merupakan suatu yang legal seperti pengajuan petisi maupun ilegal, meliputi;
 - a. Konfrontasi
 - b. Mogok
 - c. Tindakan Kekerasan Politik terhadap Harta Benda
 - d. Tindakan Kekerasan Politik terhadap Manusia,dll.

Jadi berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi politik menurut para ahli diatas, maka bentuk partisipasi politik dalam penelitian ini merupakan bagian dari kegiatan konvensional yang berupa pemberian suara (voting).

2. Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2009

a. Hakikat Pemilu Legislatif

Menurut UU No 10 tahun 2008 pasal 1 yakni :

Pemilihan Umum, disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, legislatif diartikan: Badan yang berwenang membuat undang-undang. Kemudian legislatif adalah badan pembentuk peraturan perundang-undangan dari segi kelembagaan dapat berkedudukan sebagai lembaga perwakilan yang mempunyai sejumlah anggota yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Faried Ali dalam Deswika, 2004:144). Selanjutnya Miriam Budiardjo menjelaskan Badan legislatif adalah lembaga yang “legislate” atau membuat undang-undang. Anggota-anggotanya dianggap yang mewakili rakyat, maka dari itu badan ini sering dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat, menurut teori yang berlaku dalam suatu pemerintahan rakyatlah yang memiliki kedaulatan penuh dan mempunyai suatu kemauan, Dewan Perwakilan Rakyat dianggap merumuskan kemauan rakyat atau kemauan umum ini dengan jalan menentukan kebijaksanaan umum (public policy) dengan jalan mengikat seluruh rakyat (Miriam Budiardjo, 1999 : 173). Jadi legislatif adalah badan atau lembaga pembuat undang-undang.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemilu Legislatif adalah Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten-Kota. Pemilu legislatif ini telah dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009. Untuk dapat menduduki jabatan di legislatif para calon anggota legislatif harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang.

b. Asas dalam Pemilu Legislatif sesuai dengan UU No 10 tahun 2008

Berdasarkan UU No 10 tahun 2008 pasal 2 tentang asas dan pelaksanaan dari pemilu yakni Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Maksud dari asas tersebut adalah :

a. Langsung

Asas langsung dapat diartikan bahwa rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendaknya

b. Umum

Umum pada dasarnya semua warga Negara yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang dapat dan berhak mengikuti pemilu

c. Bebas

Bebas artinya setiap warga Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun

d. Rahasia

Rahasia artinya rahasia dalam memberikan suaranya, pemilih harus menjamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun

e. Jujur

Jujur artinya dalam menyelenggarakan pemilu setiap penyelenggaraan, aparat pemerintah, peserta, pengawas, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f. Adil

Maksud dari asas ini adalah setiap pemilih mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun.

C. Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Anggota Legislatif tahun 2009

Pelaksanaan pemilihan anggota legislatif ini diatur dalam pasal 22E ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni pemilu diselenggarakan untuk memilih Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagai penyalur aspirasi politik rakyat. Tujuan pemilu dilaksanakan langsung oleh rakyat karena pemilu merupakan suatu sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis. Tujuan dari diselenggarakannya pemilu adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

Undang-undang yang mengatur tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah UU No 10 tahun 2008, undang-undang ini adalah undang-undang terbaru sebagai pengganti dari UU No 12 tahun 2003. UU No 12 tahun 2003 ini merupakan pengganti UU No 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum yang kemudian diganti dengan UU No 4 tahun 2000 karena Undang-undang lama tersebut dianggap sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dinamika masyarakat. Dijelaskan dalam UU No. 12 tahun 2003 bahwa perubahan yang terjadi pada UUD 1945 Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar” maksudnya bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan menurut UUD (Anas Urbaningrum : 2010).

Berdasarkan UU No 10 tahun 2008 pasal 4 ayat 1 bahwa pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali sedangkan ayat 2 dijelaskan bahwa ada beberapa tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan anggota legislatif tahun 2009 sebagai berikut :

1. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
2. Pendaftaran Peserta Pemilu
3. Penetapan Peserta Pemilu
4. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan
5. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
6. Masa kampanye
7. Masa tenang
8. Pemungutan dan penghitungan suara
9. Penetapan hasil Pemilu dan
10. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Dari tahapan penyelenggaraan pemilu tersebut, penulis hanya mengkaji dua tahap penyelenggaraan pemilu, yaitu : pada masa kampanye dan pada tahap pemungutan dan penghitungan suara. Pada tahap ini tidak hanya banyak membutuhkan keterlibatan masyarakat akan tetapi juga karena banyaknya terjadi penyelewengan pada saat tahapan penyelenggaraan pemilu (Ahmad Budiman, 2009).

Maka dalam penelitian ini yang akan dilihat dan diteliti dalam pemilihan anggota legislatif tahun 2009 adalah :

a. Tingkat partisipasi politik masyarakat pada tahap kampanye

Sebelum dilakukan tahapan kegiatan kampanye, KPUD melaksanakan pengundian dan penetapan nomor calon. KPUD harus mengumumkan calon dan nomor calon kepada masyarakat. Kampanye merupakan unsur penting dalam upaya menarik simpati rakyat agar menjatuhkan pilihan masyarakat pada salah satu calon peserta pemilu yang didukungnya. Dalam upaya tersebut peserta pemilu menyampaikan berbagai metode, materi, dan bentuk yang bisa mengikat banyak orang. Kampanye merupakan bagian dari pemilu legislatif yang dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye dengan penekanan pada penyampaian visi, misi dan program kerja.

Hal itu sesuai dengan menurut UU no 10 tahun 2008 pasal 1 ayat 26 yang dijelaskan bahwa :

Kampanye Pemilihan umum adalah kegiatan Peserta Pemilihan umum yakni partai politik dalam Pemilihan anggota DPD, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.

Jadi jelaslah bahwa kegiatan kampanye dibutuhkan oleh peserta pemilih untuk mendapatkan dukungan dan keaktifan dari masyarakat agar menghadiri pelaksanaan kampanye yang diselenggarakan oleh peserta pemilih tersebut. Berdasarkan UU no 10 tahun 2008 pasal 78 ayat 3 dijelaskan bahwa : (3) Peserta kampanye terdiri atas anggota masyarakat.

Dari ketentuan pasal tersebut jelaslah bahwa pelaksanaan kampanye tidak akan terselenggara tanpa adanya keikutsertaan dan kehadiran dari masyarakat itu sendiri karena masyarakat itu sendiri adalah peserta dari kampanye. Menurut Yuhdi (2010) "Dalam rangka pemberdayaan kampanye agar menjadi wahana komunikasi dan pendidikan politik, KPUD berkewajiban menyelenggarakan debat publik antar pasangan calon. Dalam debat publik itulah masyarakat akan memahami visi, misi dan karakteristik dari peserta pemilu legislatif. Tingginya partisipasi masyarakat dalam kampanye akan terjadi apabila banyak masyarakat yang ikut serta dan menanggapi jalannya kampanye secara kritis. Dengan dibantu Panwas Pemilu

legislatif, KPUD menegakkan aturan main kampanye, termasuk memberikan sanksi atas pelanggaran ketentuan kampanye”.

Dari pendapat yang dikemukakan Yuhdi diatas maka dapat kita tarik kesimpulan keikutsertaan masyarakat dan tanggapan dari masyarakat terhadap pelaksanaan kampanye dapat mempertinggi tingkat partisipasi masyarakat. Namun di lain pihak akibat tekanan dan trauma terhadap janji-janji kosong pada pemilu lalu, menyebabkan tidak adanya perhatian masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kampanye. Hasilnya partisipasi masyarakat pada tahap ini menjadi rendah. Pelaksanaan kampanye dari masing-masing partai politik harus mampu menawarkan program-program yang sesuai dengan keinginan rakyat dan visi misi tersebut harus benar-benar diterapkan agar dapat menarik masyarakat sebanyak mungkin.

Dalam tahap pelaksanaan kampanye pemilu legislatif, partisipasi politik yang diberikan masyarakat dapat tercermin dari tindakan masyarakat seperti :

1. Intensitas kehadiran masyarakat pada tahap kampanye dalam pemilihan anggota legislatif tahun 2009
2. Keikutsertaan masyarakat mengajak orang lain untuk ikut kegiatan kampanye dalam pemilihan anggota legislatif tahun 2009

3. Tindakan masyarakat pada saat kampanye ketika memahami karakteristik dari calon anggota legislatif dilihat dari visi, misi dan sikap calon anggota legislatif
 4. Keikutsertaan masyarakat dalam memberikan dukungan kepada calon anggota legislatif yang akan dipilihnya
 5. Tindakan masyarakat ketika calon anggota legislatif tahun 2009 melanggar aturan berkampanye.
- b. Tingkat partisipasi politik masyarakat pada tahap pemungutan suara

Proses pemilu legislatif yang juga banyak melibatkan masyarakat yakni dilanjutkan dengan tahapan kegiatan pemungutan suara dan penghitungan suara. Menurut Yuhdi (2010) "Pada tahap pemungutan suara merupakan kegiatan dimana "bekal" yang diperoleh warga selama masa kampanye digunakan, penyelenggara pemilu legislatif, khususnya KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), berkewajiban memberikan ruang seluas-luasnya bagi pemilih untuk menggunakan hak pilih (universal suara) dengan tanpa mengurangi kewaspadaan dan komitmen menjaga keamanan proses pemilihan dan pemungutan suara dalam rangka penegakan prinsip one person, one vote, one value". Jadi sebagai masyarakat yang baik harus menggunakan hak pilihnya sebaik mungkin, karena satu suara pada pemilu sangat berharga untuk menentukan arah negara kedepannya.

Kemudian menurut Irvan Mawardi (2008) mengatakan bahwa ”Partisipasi masyarakat tinggi tidak hanya dilihat dari banyaknya masyarakat yang datang ke TPS namun juga ikut mengikuti jalannya pemungutan suara sampai pada perhitungan suara”. Partisipasi ini meliputi kegiatan pemberian suara atau menggunakan hak pilihnya, menjadi panitia dan bersedia menjadi saksi dalam pemilihan anggota legislatif.

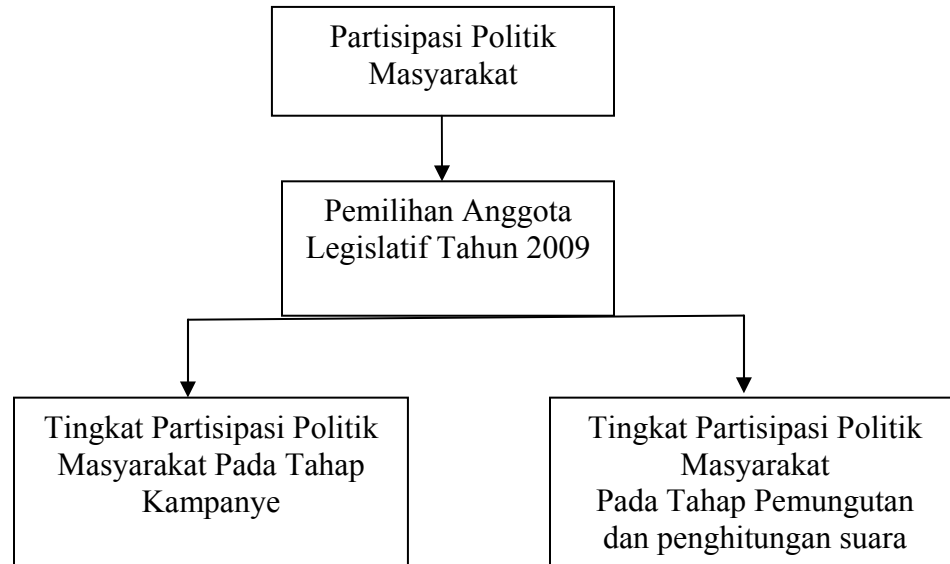
Sementara penghitungan suara merupakan penghitungan dan pengklasifikasian jumlah suara yang masuk pada masing-masing partai politik peserta pemilu, dimana perolehan suara setiap partai langsung dihitung dan jumlahnya dicatat dalam formulir khusus serta langsung diumumkan didepan wakil partai, pengawas dan semua yang hadir. Agar dapat disaksikan oleh masyarakat umum hasil dari penghitungan suara.

Partisipasi politik masyarakat pada tahap pemungutan dan penghitungan suara ini dicermati melalui :

1. Keaktifan masyarakat untuk menghadiri pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
2. Keikutsertaan dan antusias masyarakat memantau jalannya pemungutan suara
3. Menjadi panitia pemungutan suara
4. Menjadi saksi dari salah satu partai politik peserta pemilu

5. Keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi penghitungan suara
6. Keaktifan masyarakat untuk mengajak orang lain ikut serta melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara.

Kerangka Konseptual



Berdasarkan kerangka konseptual di atas maka dapat diuraikan bahwa adanya suatu partisipasi politik masyarakat salah satunya dalam pemberian suara pada pemilihan anggota legislatif tahun 2009. Tingkat partisipasi politik masyarakat pada penelitian ini dilihat dari dua tahap penyelenggaraan pemilu yaitu Tingkat partisipasi politik masyarakat pada tahap kampanye serta pada tahap pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan anggota legislatif tahun 2009 di Kecamatan Koto Tengah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan tentang tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan anggota legislatif tahun 2009 di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- 1) Tingkat partisipasi politik masyarakat pada tahap kampanye dalam pemilihan anggota legislatif tahun 2009 berada pada kategori sedang dengan persentase 63,28% dengan rincian : Intensitas kehadiran masyarakat dalam kampanye dengan persentase 43,7% termasuk kategori rendah, Ikut serta memberikan dukungan kepada calon anggota legislatif tahun 2009 berada pada kategori sedang dengan persentase sebesar 72,2%, Tindakan masyarakat ketika calon anggota legislatif tahun 2009 melanggar aturan berkampanye sebesar 66,6% juga berada pada kategori sedang, serta tindakan masyarakat saat berkampanye dalam memahami karakteristik dari calon anggota legislatif juga termasuk pada kategori sedang yakni dengan persentase sebesar 60,2% kemudian memahami karakteristik dari calon anggota legislatif tahun 2009 dengan persentase 73,7% termasuk kategori tinggi.
- 2) Tingkat partisipasi politik masyarakat pada tahap pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan anggota legislatif tahun 2009 berada pada kategori sedang dengan persentase 69,18% dengan rincian : Menjadi

panitia pemungutan dan penghitungan suara dengan persentase sebesar 42,7% termasuk pada kategori rendah. Dan menjadi saksi dari salah satu partai politik termasuk kategori sedang dengan persentase sebesar 68,6%, keaktifan mengajak orang lain untuk ikut melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara juga termasuk pada kategori sedang yakni dengan persentase sebesar 65%. Kemudian keikutsertaan dan antusias masyarakat dalam memantau jalannya pemungutan suara termasuk kategori tinggi dengan persentase 86,3%, keaktifan masyarakat untuk menghadiri pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara juga termasuk pada kategori sedang dengan persentase sebesar 77,2%, dan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi penghitungan suara dengan persentase sebesar 75,3% juga termasuk pada kategori tinggi.

Jadi dari kesimpulan di atas dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan anggota legislatif tahun 2009 berada pada kategori sedang. Partisipasi politik masyarakat berada pada kategori sedang karena kurangnya keikutsertaan masyarakat terhadap kegiatan pemilu. Hal itu disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan haknya sebagai pemilih serta disebabkan karena faktor pendidikannya masih pada tingkat menengah serta tingkat pekerjaan yang pada umumnya sebagai pedagang/wiraswasta sehingga masyarakat lebih mengutamakan mencari penghasilan demi kehidupannya dan masyarakat beranggapan bahwa kegiatan pemilu merupakan kegiatan yang membuang waktu dan tidak memberi perubahan dalam kehidupannya

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

- 1) Dalam penelitian telah ditemukan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan anggota legislatif tahun 2009 berada pada kategori sedang, untuk itu penulis mengharapkan kepada masyarakat kecamatan koto tangah untuk lebih ditingkatkan lagi partisipasi politiknya terutama pada pemilu karena masyarakatlah yang memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan pemimpin dan arah perjalanan bangsa kedepan
- 2) Diharapkan kepada peserta pemilu untuk menawarkan program-program yang sesuai dengan keinginan rakyat dan jika terpilih benar-benar diterapkan program tersebut agar menumbuhkan kembali rasa kepercayaan masyarakat kepada peserta pemilu baik yang telah dipilihnya maupun yang akan dipilihnya pada pemilu periode selanjutnya
- 3) Diharapkan kepada pemerintah kota terutama kepada kecamatan koto tangah untuk lebih memperhatikan lagi kesadaran dan pengetahuan politik warganya agar masyarakat memiliki keinginan untuk aktif berpartisipasi dan ikut serta dalam pelaksanaan pemilu selanjutnya agar terciptanya pemilu yang benar-benar demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Rafni dan Suryanef. 2003. *Pelaksanaan Kampanye Pemilu 1999 Dan Implikasinya Terhadap Perilaku Memilih Masyarakat Kota Padang*. Laporan Penelitian. Padang. : FIS UNP
- A. Muri Yusuf. 2007. *Metodologi Penelitian*. Padang : UNP Press.
- Arbi Sanit. 1985. *Perwakilan Politik Di Indonesia*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Cangara, Hafied. 2009. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori Dan Strategi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Deswika. 2004. *Pemalsuan Ijazah Oleh Calon Legislatif Pemilu 2004: Di Daerah Pemilihan Kab. Solok*. Skripsi. UNP.
- Gabriel Almond dan Sidney Verba. 1990. *Budaya Politik : Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Husein Umar,dkk. 2008. *Desain penelitian MSDM dan perilaku karyawan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jakarta : Gaung Persada Press.
- Masri Singarimbun. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES
- Miriam, Budiardjo 1994. *Demokrasi Di Indonesia: Demokrasi Parlementer Dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 1996. *Demokrasi Di Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 1999. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rafael Raga Maran. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami ilmu politik*. Jakarta : PT Grasindo
- Rekapitulasi Dari Komisi Pemilihan Umum Tentang Jumlah Daftar Pemilih Tetap Di Kecamatan Koto Tangah Di Kota Padang Sumatera Barat
- Riduwan. 2004. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan Dan Peneliti Pemula*. Bandung : Alfabeta
- Rush, Michael dan Phillip Althoff. 2005. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Samuel P. Huntington, Joan Nelson. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta : PT. Rineka Cipta